

- Bagir Manan. *Menjaga Kebebasan Pers di Pusaran Hukum*. Cetakan kedua, Dewan Pers. Jakarta. 2011.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Bellefroid dalam Moempoeni Martoyo. *Politik Hukum dalam Sketsa*. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. 2000.
- Bernard Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* Mandar Maju,.Bandung. 2000.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta. 2008.
- Charles Samford. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*. Inc Basil Blackwell. New York. 1989.
- CJM. *Schut. Recht En Samenleving*. Assen. dalam IGM Nurdjana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. 1998.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Naskah Akademik*. 2008.
- Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Refika Aditama. Bandung. 2005.

- Emerson Yuntho. *Lampu Merah Bagi Kebebasan Pers*. Koran Jawa Pos, 3 Mei 2009). hlm. 3. Lihat juga di <http://epajak.org/abg/free-monitor-hukum>.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara PersadaUtama, Tangerang Selatan. 2017.
- Garcia Krisnando Nathanael. *Komunikasi dan Media Global*. CV. Jakad Media Publishing, Surabaya. 2021.
- Handri Raharjo. *Sistem Hukum Indonesia*. Media Pressindo. Yogyakarta. 2018.
- Hanifa Ahsan, “*Pertanggungjawaban Perusahaan Pers atas Tindak Pidana Penistaan dalam Karya jurnalistik*”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2021.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Russel dan Russel. New York. 1973.
- Harsanto Nursadi. *Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Terbuka. Jakarta. 2007.
- Idri Shaffat. *Kebebasan. Tanggung Jawab. dan Penyimpangan*. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2008.
- IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Cetakan Kesatu. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010.
- James F. Gilsinan. *Criminology and Public Policy An Introduction*. Prentice Hall, Englewood Cliffs. New Jersey. 1990.
- Jazim Hamidi. dkk (Tim Geen Mind Community/GMC). *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*. Totalmedia. Malang. 2009.
- J.J. Von Schmid. *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum*. Pejermah. R. Wiratno Djamiluddin Singomangkuto dan Jamadi. Pustaka Sarjana. Jakarta. 1998.
- Jaholden. *Reformulasi Hukum Pidana di Indonesia*. Bircu Publishing. Sumatera Utara. 2021.

- John Rawls. *A Theory of Justice*. Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2006.
- Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktik*. Cetakan Pertama. Kepel Press. Yogyakarta. 2019.
- Juniver Girsang. *Penyelesaian Sengketa Pers*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2007.
- Lembaga Bantuan Hukum Pers. UU ITE Mengancam Kebebasan Pers. *Policy Paper*. Lembaga Bantuan Hukum Pers. 2021.
- Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif. Teoritis dan Praktik Alumni*. Bandung. 2008.
- Masduki dan Musayin Nazaruddin (eds), *Media, Jurnalisme dan Budaya Populer*. Cet. 1. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta. 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bina Cipta. Bandung. 1986.
- Mudzakir. "*Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*", **Disertasi** FH-UI, Jakarta, 2001.
- Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum*, Suatu Studi tentang Suatu Prinsip-prinsipnya Diklat dari Segi Hukum Islam. Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa kini. Prenada Media Grup. Jakarta. 2003.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP. Semarang. 1995.
- Muladi dan Prijatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung. 1991.
- Noor M. Aziz. *Laporan Pengkajian Hukum tentang Menginventarisir Seluruh Lingkup yang Menjadi Persoalan di Bidang Pers*. BPHN-Jakarta. 2019.
- Nurudin. *Jurnalisme Masa Kini*, Rajawali Pres. Jakarta. 2009.

- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2008.
- Oemar Seno Adji. *Pers Aspek-Aspek Hukum*. Erlangga. Jakarta. 1974.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*. Cet. II. Ghalia. Jakarta Indonesia. 1986.
- Pieter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Surabaya, 2009.
- Ronal Koven, *New Media The Press Freedom Dimension*, UNESCO, in Paris 15-16 February 2007.
- R. Helambang Perdana Wirataman, Sinta Dewi Rosadi, Heribertus Jaka Triyana, Shinta Agustina, L.I. Nurtjahyo, Masitoh Indriani, Stanley Adi Prasetyo, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Wahyudn Djafar, Miftah Fadhli, Lintang Setianti, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta. 2006.
- R. Herlambang Perdana Wirataman, Sinta Dewi Rosadi, Herbertus Jaka Triyana, Shinta Agustina, L.I. Nurtjahyo, Masitoh Indriani, Stanley Adi Prasetyo, Indriaswati Dyah Saptaningrum Wahyudin Djafar, Miftah Fadhli, Lintang Setianti, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta. 2016.
- Rulli Nasrullah. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi. Budaya dan Sosioteknologi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2017.
- Rulli Nasrullah. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Prenamedia Group. Jakarta. 2022.
- Sahat Maruli T. Situmeang. *Cyber Law*. CV. Cakra. Bandung. 2020.
- Satjipto Raharjo *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 2020.
- Siebert, Fred. S., Theodore, Peterson., Schramm, Wilbur, *Four Theories of The Press: The Authotarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet*

Communist Concept of What the Press Should Be and Do. University of Illinois Press, Chicago. 1963.

Sigid Suseso. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber.* Refika Aditama. Bandung. 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat.* PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2006.

Sudarto. *Hukum Pidana I.* Yayasan Sudarto. Semarang. 1990.

Suharto. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan.* Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 1991.

Syafriadi. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia,* Yogyakarta. 2018.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005.

Tim Lembaga Pers Dr. Sotomo dan Djarum Foundation Bakti Pada Negeri. *Panduan Jurnalistik Praktis Mendalami Penulisan Berita Dan Feature. Memahami Etika dan Hukum Pers.* Lembaga Pers Dr, sutomo. Jakarta. 2014.

Wahid Abdul dan Labib Muhammad. *Kejahatan Mayantara.* Refika Aitama. Bandung. 2005.

Jurnal

Artidjo Askar. "Indonesia Menyongsong Jakarta World Forum for Media Development 2016". **Jurnal Dewan Pers**, 12 (2016).

Asep Setiawan. *Jurnalisme dan Media Siber di Platform Digital.* Dalam buletin Dewan Pers "ETIKA MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS Volume 07 Juli". 2020.

Badri. *Jurnalisme Siber.* Riau Creative Multimedia, Pekanbaru. 2013.

- Bagir Manan, "Indonesia Menyongsong Jakarta World Forum for Media Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation," *Jurnal Pekommas*, Vol. 3, Nomor 1 April 2018.
- Development 2016", **Jurnal Dewan Pers**, 12 (2016),
- Dwita Rezkiana, Muh. Akbar, Hasmin, dan Moh Yusuf Yusuf., *PERANAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERS MENURUT UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS*. *Jurnal Kolaboratif Sains*. 2019, 2.1.
- Fajar Nurhardioanto. *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. Volume 11 Nomor 1. 2015.
- Lewokeda, M. D. *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*. *Mimbar Keadilan*. 14(28). 2018.
- Lynsey Afsari Puteri. *Pers Indonesia dan Dominasi Media Siber*. Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi. Volume 3 Nomor 1. 2020.
- Muhammad Anshar Akil. "REGULASI MEDIA DI INDONESIA (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran)." *Jurnal Dakwah Tabligh*. Vol. 15. Nomor 2 Desember 2014.
- Nina Andriana, *MEDIA SIBER SEBAGAI ALTERNATIF JEMBATAN KOMUNIKASI ANTARA RAKYAT DAN PEMIMPINNYA*. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10, Nomor 2 Desember. 2013.
- Ni Putu Noni Suharyanti. "Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan di Media Massa". **Jurnal Advokasi**. 5 (2). 2015.
- Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 2021.
- Rahmawati, I., dan Gani, R. A. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DELIK PERS (Suatu Kajian Normatif)*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(4), 2017.

Rifqi Sjarief Assegaf, *Pers Diadili*. Jurnal kajian Putusan Pengadilan. Leip3. Edisi 3. 2004.

Rozi, M. F., & Purwanto, R. H. *TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS KARYA JURNALISTIK DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2). 2018.

Rafael Muntu. *Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers. Lex et Societatis*. April. Vo.2 No.3. 2014.

Sayuti. "KONSEP RECHTSSTAAT DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Kajian Terhadap Pendapat Azhari." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*. Vol. 4. Nomor 2 Desember 2011.

Samsul Wahidin. "Tanggung Jawab Pemberitaan Pers Dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", **JURNAL HUKUM**. 14 (7). 2000.

Wahyudi M. Pratopo. 2018. *Pandangan Tokoh Pers Terhadap Etika Media Baru*. Jurnal Pustaka Komunikasi. Volume 1 Nomor 1.

Winda Primasari. *Pemaknaan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Terhadap Media Siber*. Jurnal Makna. Volume 1 Nomor 2. 2016.

Yosep Adi Prasetyo. "Indonesia Menyongsong Jakarta World Forum for Media Development 2016". **Jurnal Dewan Pers**. 12 (2016).

Website/Media

<http://martabeneews.com/berita-259/oknum-anggota.dprd-madina-ini-diduga-jual-nama-lembaga-dalam-permasalahan-ganti-rugi-masyarakat-desa-kampung-baru.html>., diakses 20 Agustus 2019.

M.caping. "Copas berita, Inilah Kebohongan Media Siber yang Terungkap di Kasus Eko Patrio, 16 Desember 2016, co.id>News>fbnewsDetail, diakses 25 Agustus 2019.

<http://nasional.sindonews.com> "Banyak Media Siber Meng-copy Paste Informasi, 20 Februari, 2017.

Koran Sulindo, (2022, Februari 15), Hari Pers Nasional: Mengenang Pers di Masa-masa Kelam, diakses dari <https://koransulindo.com/hari-pers-nasional-mengenang-pers-di-masa-masa-kelam/> pada 21 Juli 2022.

Kompas.com, (2020, Desember 22), Pers di Era Orde Baru, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/22/165353669/pers-di-era-orde-baru?page=all> pada 21 Juli 2022.

Databoks, (2021, Mei 4), Kebebasan Pers Indonesia Memburuk sejak 2020. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/kebebasan-pers-indonesia-memburuk-sejak-2020>, Pada 12 Juli 2022.

Kominfo, (2015, Februari 27), UU ITE tidak membelenggu Kebebasan Pers Justru beri perlindungan, diakses dari <https://m.kominfo.go.id/content/detail/4507/uu-ite-tidak-membelenggu-kebebasan-pers-justru-beri-perlindungan/0/berita> satker. Pada 13 Juli 2022.

<https://www.romelteamedia.com/2022/05/perbedaan-media-massa-sosial-online.html>

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=668:dinamika-konvergensi-hukum-telematika-dalam-sistem-hukum-nasional&catid=107:hukum-teknologi-informasi&Itemid=187

Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan, 92,60 persen sumber *hoax* atau berita bohong berasal dari media sosial (Medsos), menurut data yang diterbitkan Kamis, 8 Februari 2018 <https://www.beritasatu.com/nasional/477617/kemkominfo-medsos-jadi-sumber-hoax> (diakses 16 Juni 2019)